

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU SD DI KABUPATEN TEGAL

Anindhita Kiky Amryudin , Sundarso , Ari Subowo
Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jl.Prof Soedharto SH, Kampus Tembalang , Semarang
Email : dokumenanin@gmail.com

Abstrak

Kebijakan Sertifikasi Guru mengacu pada Undang-Undang Guru Dosen Nomor 14 tahun 2005 bertujuan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru, serta meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui proses implementasi yang efektif yang dapat dilihat dari ketepatan kebijakan , ketepatan pelaksanaan , ketepatan target , ketepatan lingkungan dan ketepatan proses.

Proses implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam mencapai tujuannya tidak terlepas dari faktor yang mendukung dan menghambat. Berdasarkan teori van Meter dan van Horn faktor yang mendukung dan menghambat berupa tujuan dan ukuran dasar/Standar kebijakan , Sumber Kebijakan, Komunikasi dan Kegiatan Pelaksanaan, Karakteristik Badan Pelaksana , Kondisi Sosial,Politik dan Ekonomi serta Disposisi Implementor.

Berdasarkan hambatan yang ada dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Tegal , penulis memberikan rekomendasi berupa : (1) sosialisasi kembali untuk guru agar bisa memahami tujuan sertifikasi guru sepenuhnya, (2) menambah jumlah staff (3) pemberian tunjangan sertifikasi digabung dengan gaji pokok (4) memberikan contoh format SK mengajar (5) mempertegas sanksi (6) persiapan berkas bagi para guru (7) Promosi yang menarik dari koperasi kepada guru (8) alokasi 2% tunjangan sertifikasi guru untuk meningkatkan sarana dan prasarana belajar mengajar.

Kata kunci : implementasi , proses , faktor pendukung , faktor penghambat

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru sejak tahun 2006 sampai sekarang ternyata masih menemui beberapa permasalahan di lapangan seperti di Kabupaten Tegal beberapa permasalahan yang muncul seperti tujuan sertifikasi guru belum dipahami sepenuhnya, masih bermasalahnya sumber dana dalam pelaksanaan sertifikasi guru, belum digunakannya wewenang oleh pelaksana kebijakan terkait kecurangan dalam uji portofolio, masih belum jelasnya informasi yang diberikan kepada guru, masih ada guru yang secara kinerja belum baik.

Berdasarkan beberapa gejala permasalahan tersebut penulis merasa perlu dilakukan suatu kajian tentang implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Tegal. Penelitian implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Tegal ini untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Tegal serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Tegal, yang harapannya dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yaitu untuk merekonstruksi teori-teori sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mengimplementasikan teori-teori yang telah ada dan dapat menambah kepustakaan tentang kebijakan sertifikasi guru di Indonesia secara umumnya. Sedangkan secara praktis dapat dijadikan masukan bagi instansi terkait untuk memperbaiki implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Tegal serta memberikan informasi bagi bahan informasi bagi peneliti lain dalam meneliti permasalahan terkait di masa yang akan datang.

Berdasarkan pertanyaan dan tujuan penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan publik milik van Meter dan van Horn serta lima keefektifan proses implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Riant Nugroho. Lima keefektifan tersebut dilihat dari ketepatan kebijakan, ketepatan target, ketepatan pelaksanaan, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Tegal berdasarkan teori van Meter dan van Horn yakni tujuan dan ukuran/standar kebijakan, sumber kebijakan, komunikasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta disposisi implementor.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Tegal menggunakan paradigma penelitian konstruktivisme/*intrepretivisme* atau pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala sosial tertentu dengan cara membandingkan gejala yang ditemukan. Sehingga penelitian kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Tegal ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Adapun, situs penelitian implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Tegal yakni di Dinas Pendidikan Kab. Tegal, UPTD Dikpora, serta SDN Harjosari Lor 01 dan SDN Bulakpacing 01.

Penelitian ini menggunakan *nonprobability* dengan teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan sample dengan pertimbangan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah staff dinas pendidikan Kab Tegal, pengawas dan guru SD tersertifikasi di Kab. Tegal.

Setelah informan ditentukan maka langkah selanjutnya adalah menentukan sumber data dan teknik pengumpulan data yang dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. Sedangkan data sekunder data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data-data tersebut dapat dikumpulkan melalui beberapa cara yaitu dokumentasi, wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka.

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dan interpretasi data yaitu melalui reduksi data yaitu data yang diperoleh dipilah sesuai dengan kebutuhan, kemudian data yang sudah dipilah disajikan yang pada akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diberikan informan dengan menggunakan analisis domain. Kualitas atau keabsahan data dapat dilihat dari membandingkan wawancara antara informan satu dengan informan lainnya dan dengan suatu dokumen yang berkaitan, ini merupakan teknik triangulasi sumber.

3. PEMBAHASAN

3.1 Proses Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SD di Kabupaten Tegal

1. Ketepatan Kebijakan

Dilihat dari aspek ketepatan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan maka kebijakan sertifikasi guru dapat memecahkan masalah yang diantaranya *pertama*, kesejahteraan guru semakin meningkat. profesi guru menjadi lebih dihargai didalam masyarakat. Kebijakan sertifikasi guru yang memberikan sertifikat pendidik dengan tidak serta-merta memberikan sertifikat pendidik tersebut kepada guru melainkan melalui tes portofolio (2006-2010) dan tes PLPG (2011-sekarang) membuat profesi guru semakin diakui, ditambah dengan pemberian tunjangan profesi pendidik yang dapat meningkatkan kesejahteraan guru membuat guru dihargai di lingkungannya, karena guru SD saat ini lebih bisa memberikan kontribusi bagi lingkungan tempat tinggalnya. Profesionalitas guru semakin baik. Kebijakan sertifikasi guru menjawab permasalahan profesionalitas guru yang selama ini menjadi permasalahan dunia pendidikan. Saat ini dengan kesejahteraan guru yang meningkat, guru tidak lagi mencari pekerjaan diluar profesinya, sehingga tidak ada lagi alasan guru meninggalkan kelas lebih awal dengan alasan mencari penghasilan tambahan.

Namun demikian permasalahan peningkatan proses dan hasil belajar belum sepenuhnya tercapai karena tunjangan sertifikasi yang seharusnya dialokasikan

pula untuk meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar sebagian besar guru menggunakannya untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Berdasarkan Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru tahun 2012 yang menyebutkan instansi yang menyelenggarakan sertifikasi guru di setiap daerah ternyata sudah dipahami benar oleh guru SD dan pengawas di Kabupaten Tegal serta Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal yang menyebutkan hal yang sama dengan petunjuk teknis yang ada. Menurut para informan instansi tersebut sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan Tupoksi yang dimiliki, yakni Rayon LPTK sebagai lembaga yang menguji dan mengeluarkan sertifikat pendidik bagi para guru, LPMP sebagai lembaga yang memberikan persetujuan daftar calon guru tersertifikasi dan mengontrol jalannya sertifikasi guru di tingkat daerah, sedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberikan sosialisasi, menetapkan peserta sertifikasi sesuai dengan Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi, dan pendataan beserta pengecekan biodata guru dan sebagainya. Bagi para informan lembaga-lembaga yang menangani kebijakan sertifikasi guru sudah tepat dan sudah menjalankan tugas yang ditetapkan dalam petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru.

3. Ketepatan Target

Berdasarkan hasil penelitian Sertifikasi Guru SD di Kabupaten Tegal sudah memenuhi syarat pertama ketepatan target yaitu sesuai dengan target atau sasaran yang ditentukan dalam peraturan pemerintah. Kesiapan sasaran/target kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Tegal saat kebijakan sertifikasi dicanangkan rata-rata tidak siap, hal ini dikarenakan guru yang berkualifikasi dibawah S1/DIV masih sangat banyak, sehingga para guru harus menempuh pendidikan S1/DIV demi mendapatkan sertifikasi guru. Ketidaksiapan yang terjadi sampai saat ini terkait administrasi seperti ketidaksiapan pengumpulan dokumen seperti piagam, sertifikat pendampingan, SK dari awal pengangkatan sampai terakhir yang terkadang sulit untuk dicari kembali bahkan tidak jarang yang hilang, sulitnya mengumpulkan dokumen tersebut ditambah dengan waktu yang diberikan sangat pendek yaitu satu minggu untuk mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Selain itu, berdasarkan studi literatur dan wawancara, kebijakan sertifikasi guru merupakan kebijakan pertama yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan profesionalitas, kualitas dan mutu pendidik melalui pemberian sertifikat pendidik disertai tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji guru dan diberikan selama empat kali dalam satu tahun.

4. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan terdiri atas dua hal yaitu lingkungan endogen dan eksogen. Lingkungan endogen berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada informan interaksi yang dilakukan antar lembaga perumus kebijakan dan

pelaksana kebijakan ditunjukkan dengan adanya rakor dengan pemerintah pusat yang diadakan setahun dua kali dalam satu kali rakor dilakukan selama 3 hari. Rakor ini dihadiri oleh pejabat di Dinas Pendidikan kabupaten/Kota diantaranya membahas pembaharuan data , laporan dan pemecahan permasalahan termasuk diantaranya permasalahan tunjangan sertifikasi guru. *Kedua* , Berdasarkan wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa persepsi atau pendapat publik terkait sertifikasi guru mengakibatkan kecemburuan sosial khususnya bagi para pegawai negeri lain selain guru yang merasa bahwa memiliki kesamaan yaitu sebagai pegawai negeri tetapi guru mendapatkan tunjangan yang sangat besar sedangkan pegawai negeri lain tidak. Selain itu publik juga menyoroti pada perubahan kesejahteraan guru menyebabkan gaya hidup guru relatif berubah guru banyak yang cenderung menggunakan uang sertifikasi seluruhnya untuk kesejahteraan hidupnya seperti untuk membeli kendaraan , merenovasi rumah , menunaikan ibadah haji dan religi lainnya tanpa diimbangi dengan peningkatan kinerja.

5. Ketepatan Proses

Pertama yakni , *Policy Acceptence* Tahap ini Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal mendapatkan perintah dari pusat untuk menjalankan tugas yang ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan. *Kedua*, yakni *Policy Adoption* Dinas Pendidikan pada tahap ini mulai mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan selama proses sertifikasi guru mulai dari menentukan staff yang menangani , mempersiapkan pagu anggaran dan sebagainya. *Ketiga*, *Policy Readiness* Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal mulai mengerjakan tugas-tugas yang diberikan secara runtut dan rutin setiap tahunnya mulai dari pendataan , pengecekan berkas , penetapan daftar guru berdasarkan kuota , melaksanakan ujian UKA dan sebagainya . Namun demikian pada tahapan ini ditemukan bahwa pegawai Dinas Pendidikan tidak mampu mengecek berkas satu per satu sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru yaitu “*Memverifikasi kelengkapan berkas calon peserta menggunakan format verifikasi yang dapat dicetak dari AP2SG*”

3.2 Faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan sertifikasi Guru SD di Kabupaten Tegal

Tabel 1. Faktor- faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Tegal

No.	Faktor yang Mendukung	Faktor yang Menghambat
1.	Implementor dan Guru sudah mengetahui standar mengikuti sertifikasi guru	Tujuan sertifikasi guru belum dipahami sepenuhnya oleh guru.

2.	Kualitas SDM pelaksana sudah baik	Kurangnya staff yang menangani sertifikasi guru
3.	Ada Tim koordinator setiap angkatan sertifikasi di setiap Kecamatan	Kekurangan dan keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi guru
4.	Tersedianya website sertifikasi guru	Ketidaksiapan guru mengikuti sertifikasi guru karena berkas yang hilang dan tercecer
5.	SOP sudah dipahami dengan baik oleh pelaksana dan guru	Format SK mengajar sering berubah-ubah
6.	Kesediaan guru untuk swadaya memberikan iuran (fotokopi,snack,transportasi dll)	Sanksi yang ada belum diterapkan secara efektif untuk kecurangan portofolio , pemenuhan 24 jam mengajar dan guru yang tidak disiplin.
7.	Adanya Rakor dan pertemuan-pertemuan berkala yang dilakukan Pemerintah Pusat , Ketua PGRI baikdengan Dinas Pendidikan dan Guru di daerah	Sebagian besar tunjangan sertifikasi guru digunakan untuk kebutuhan pribadi guru tidak untuk meningkatkan sarana dan prasarana belajar mengajar
8.	Adanya dukungan dari agen pelaksana atas kebijakan sertifikasi guru	

3 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Proses implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Tegal apabila dilihat dari ketepatan kebijakan , ketepatan pelaksanaan , ketepatan target , ketepatan lingkungan dan ketepatan proses adalah sudah sesuai dengan peraturan yang ada . Namun demikian , banyak guru yang belum siap melaksanakan kebijakan sertifikasi guru (berkualifikasi dibawah S1/DIV) pada saat sertifikasi mulai dicanangkan sehingga banyak guru yang harus kuliah terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikasi guru. Adapun permasalahan lainnya yaitu banyak Guru kehilangan SK pengangkatan yang harus dilampirkan dari mulai SK pengangkatan awal sampai terakhir. Terakhir adalah ketepatan lingkungan yang masih bermasalah di lingkungan eksogen

yaitu adanya kecemburuan sosial dari pegawai lain selain guru , status sosial guru disoroti masyarakat karena kehidupan guru yang semakin sejahtera dengan menunjukkan kemampuannya membeli kendaraan, memperbaiki rumah , menunaikan ibadah haji dan membeli perhiasan.

2. Implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Tegal menemui beberapa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru seperti tujuan kebijakan sertifikasi guru belum dipahami sepenuhnya oleh guru , hal ini terlihat dari penggunaan tunjangan sebagian besar adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan keluarganya. Kurangnya staff yang menangani sertifikasi guru . Selain kurangnya staff yang menangani yang sering dikeluhkan oleh guru adalah keterlambatan pencairan tunjangan yaitu tidak dibayarkannya tunjangan selama 2 bulan di tahun 2012. Keterlambatan tersebut salah satunya dikarenakan administrasi guru yang terlambat sehingga menghambat pencairan tunjangan selain itu. Faktor yang mempengaruhi berikutnya adalah berubah-ubahnya ketentuan format SK mengajar yang membuat guru menjadi bingung. Kemudian tidak diterapkannya sanksi bagi oknum yang melakukan kecurangan dalam tes portofolio dan tidak efektifnya sanksi bagi guru yang tidak memenuhi jam mengajar 24 jam /minggu. Adapun Dampak sosial negatif dari sertifikasi guru yaitu gaya hidup guru yang lebih memperlihatkan kemewahan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti memberikan beberapa rekomendasi antara lain

1. Perlunya sosialisasi kembali untuk para guru agar lebih memahami tujuan sertifikasi guru sesungguhnya.
2. Menambah jumlah staff di Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal yang menangani kebijakan sertifikasi guru khususnya di tingkat SD . Hal ini dikarenakan Dikdas merupakan bidang yang memiliki jumlah tenaga pendidikan dan kuota guru sertifikasi yang paling banyak yaitu 1900 kuota di tahun 2013. Sehingga staff yang menangani sertifikasi guru khususnya bidang Dikdas yang saat ini hanya 1 orang perlu ditambah yaitu sebanyak 2 atau 3 orang yang merupakan staff Bidang PPTK Dinas Pendidikan kabupaten Tegal.
3. Meningkatkan koordinasi antara Departemen Keuangan dengan Pemerintah Daerah untuk mengatasi kekurangan dan keterlambatan pencairan tunjangan.
4. Mengupload contoh Format SK Mengajar . Format SK mengajar diakui oleh para guru sering mengalami perubahan-perubahan sehingga membuat guru sering mengalami kebingungan. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis memberikan rekomendasi untuk memasang contoh format SK mengajar yang benar di dalam website sertifikasi guru serta melalui koordinator disampaikan melalui email atau selebaran kepada guru.
5. Mempertegas Penerapan Sanksi. Selama ini pemerintah belum tegas memberikan sanksi kepada guru yang melakukan kecurangan portofolio kendati tes jalur portofolio sekarang sudah dihapus. Namun demikian

penerapan sanksi untuk hal lainnya seperti tidak memenuhinya jam mengajar guru 24 jam/minggu masih kurang pengawasan dan tindakan. Hal ini dibuktikan adanya oknum guru yang jarang hadir di kelas untuk megajar namun tetap mendapatkan tunjangan profesi .

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino,Leo . (2008) . Dasar- Dasar Kebijakan Publik . Bandung : Alfabeta
- Handoko,T.Hani.(2003). Manajemen (2nd ed.) .Yogyakarta : BPFE
- Indihahono,Dwiyanto.(2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta : Gava Media
- Kusumanegara. Solahuddin.(2010). Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media
- Moleong, Lexy, Prof. Dr., MA. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa,E. (2009) . Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho,Riant.(2011). Public Policy. Yogyakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Sarwono ,Jonathan .(2006) . Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . Yogyakarta : Graha Ilmu
- Singarimbun,Masri dan Sofyan Effendi . (2006) .Metode Penelitian Survei . Jakarta : LP3ES
- Subarsono.(2006). Analisis Kebijakan Publik : Konsep,Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono.(2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Surakhmad,Winarno.(2009). Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara
- Suwitri,Sri . (2011) . Konsep Dasar Kebijakan Publik . Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Tirtarahardja,Umar and S.L.La Sulo.(2005).Pengantar Pendidikan. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Trianto , Titik Triwulan Tutik. (2007) . Sertifikasi Guru Dan Upaya Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan. Jakarta :Prestasi Pustaka

Winarno,Budi. (2012). Kebijakan Publik Teori,Proses, dan Studi Kasus (Revisi Terbaru). Jakarta : CAPS

Skripsi dan Tesis :

Mulyani, Ade .(2012). Evaluasi Program Sertifikasi Guru di Kota Cilegon.*Skripsi*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sudarman. (2007) . Persepsi Guru Sekolah Dasar Terhadap Program Sertifikasi Guru Di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Sebagai Dasar Penguatan Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru. Tesis. Universitas Muhammadiyah Malang

Winarsih .(2008). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang). *Tesis*. Universitas Diponegoro

Media Massa :

Farid Assifa. (2012, 7 November). Dipungut Rp. 500.000,- Guru Sertifikasi Keberatan
Dalam<http://regional.kompas.com/read/2012/11/07/19570851/Dipungut.Rp.500.000..Guru.Sertifikasi.Keberatan> .Diunduh pada 23 September 2012 pukul 19.23 WIB

Kamdi, Waras. (2010, November 24). Sertifikasi Guru . *Kompas* . Dalam <http://edukasi.kompas.com/read/2010/11/24/1022321/Sertifikasi.Guru>. Diunduh pada 23 September 2012 pukul 9.17 WIB

Napitupulu,Ester Lince . (2009 , 9 Oktober) . Kinerja Guru Pascasertifikasi Harus Diawasi.
Dalam<http://edukasi.kompas.com/read/2009/10/09/21094596/kinerja.guru.pascasertifikasi.harus.diawasi>. *Kompas*. Diunduh pada 22 September 2012 pukul 19.11 WIB.

____, (2009, 13 November). Sertifikasi Guru Tidak Tepat Sasaran .*Kompas*.
Dalam <http://edukasi.kompas.com/read/2009/11/13/07473414/sertifikasi.guru.tidak.tepat.sasaran>. Diunduh pada 13 Desember 2012 pukul 5 :44 WIB

____, (2010 : 11 Januari). Daerah Diminta Taati Aturan Pencairan. *Suara Merdeka*.
Dalam <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/08/09/195421/16/Daerah-Diminta-Taati-Aturan-Pencairan>. Diunduh pada 23 September 2012 pukul 8:53 WIB

Jurnal Ilmiah :

Kurniawan , Bachtiar Dwi . (2011) . Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru Di Kota Yogyakarta . *Jurnal Studi Pemerintahan*, II (2) : 259-278

Neill,James . (2006) . Qualitative Research Methods Analysis of Professional Literature . *Qualitative Research* , I (6) : 1-6

Siahaan,Sudirman ,and Rr.Martiningsih.(2008). Seputar Sertifikasi Guru. *Jurnal Teknodik* , XII(6) : 91-107

Taufiqurrahman,Mhd.(2012).ANALISIS YURIDIS TERHADAP SERTIFIKASI GURU BERBASIS PORTOFOLIO. Dalam <http://uda.ac.id/jurnal/files/JURNAL%20CETAK.pdf> . Diunduh pada 22 September 2012 pukul 11.20 WIB

Sumber Lain:

Dinas Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Statistik Pendidikan.

(2006).Dalamhttp://www.psp.kemdiknas.go.id/uploads/Publikasi%20Pendidikan/buku%20saku/bukusaku_0506.pdf . Diunduh pada 22 September 2012 pukul 11:27 WIB.

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.(2012). Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2012 Di Rayon LPTK. Dalam psg15.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/03/Buku-2.pdf. Diunduh pada 23 September 2012 pukul 10:55 WIB

Rahardjo,Mudjia. (2010). Profesi dan Profesioalisasi Keguruan.Dalam <http://mudjiarahardjo.com/artikel/136-pengembangan-profesionalisme-guru-2.html>. Diunduh pada 15 Februari 2013 pukul 17:54 WIB

SIM NUPTK. (2010).Data Guru Berdasarkan Tlingkat Pendidikan Guruu Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010. Dalam http://lpmpjateng.go.id/web/lpmp.files/Pddk_10.htm.Diunduh pada 23 September 2012 pukul 10.05 WIB

Teori-Teori Administasi Publik . (2010). Dalam <http://eprints.undip.ac.id/5204/>. Diunduh pada 20 Oktober 2012 pukul 9:46 WIB

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang –Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang – Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Permendikbud Nomor 5 tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan